

HIBAH BOTI MASJID DAN MUSHOLA TERHADAP POPULISME ISLAM ANIES BASWEDAN KEPADA PENERIMA BANTUAN TAHUN 2019-2022

Gusti Yosa Jayakarta¹, Amri Yusra²
Program Studi Ilmu Politik
Universitas Indonesia
gusti.yosa@ui.ac.id¹, amri.yusra@ui.ac.id²

Abstrak

Pada tahun 2017 Pilkada DKI Jakarta, saat itu gubernur pertahana Basuki Tjajana Purnama kalah dari lawannya Anies Baswedan. Pemilihan tersebut menarik karena sering sekali terjadi politik identitas yang dilakukan oleh Anies demi merebut suara masyarakat muslim. Pendekatan melalui jalan populisme Islam menjadi salah satu perangkat utama dalam kemenangan pasangan nomor urut 2 tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dukungan salah satu organisasi masyarakat Islam bernama Front Pembela Islam secara terbuka menyatakan dukungan dan disusul oleh dengan PWNU DKI Jakarta. Pasca Pilkada tersebut dalam 23 janji kampanye Anies tersebut memuat salah satu poin yang mendukung citra pemimpin masyarakat muslim meskipun secara eksplisit yakni peningkatan bantuan sosial rumah ibadah. Pada akhirnya pada tahun 2019 realisasi untuk mendukung citra populis Islam ditambah memenuhi janji kampanye hingga hibah khusus Mushola dan Masjid dicetuskan melalui kerjasama dengan DMI Provinsi DKI Jakarta. Anggaran hibah mencapai seratus miliar lebih untuk bantuan operasional tempat ibadah umat muslim demi memperlancar gagasan populisme Islam dibangun melalui citra pemimpin masyarakat muslim yang cinta terhadap Mushola dan Masjid. Peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para penerima bantuan, DMI DKI Jakarta, dan Biro Pendidikan Mental Spiritual akan mendeskripsikan pemberian hibah yang sukses menggaet hati masyarakat muslim di DKI Jakarta.

Kata kunci: hibah, bantuan, populisme islam, masjid, musholla

Abstract

In 2017 the DKI Jakarta governor election took place, at that time the incumbent governor Basuki Tjajana Purnama lost to his opponent Anies Baswedan. The election was interesting because Anies often used identity politics to win the votes of the Muslim community. The approach through Islamic populism is one of the main tools in winning in election. This is evidenced by the support of an Islamic community organization called Front Pembela Islam, which further openly supported by the PWNU DKI Jakarta. The post-election in Anies 23 campaign contains one of the points that supports the image of a Muslim community leader although explicitly namely increasing social assistance for houses of worship. In the end, in 2019 the realization was to support the populist image of Islam plus to fulfill campaign promises so that special grants for prayer rooms and mosques were initiated in collaboration with DMI DKI Jakarta. The grant budget reaches more than one hundred billion for operational assistance for Muslim places of worship in order to facilitate the idea of Islamic populism built through the image of Muslim community leaders who love prayer rooms and mosques. Researchers will use a qualitative method with in-depth interviews with beneficiaries, DMI DKI Jakarta, and the Bureau of Mental Spiritual Education will describe how grants have been successful in capturing the hearts of the Muslim community in Jakarta.

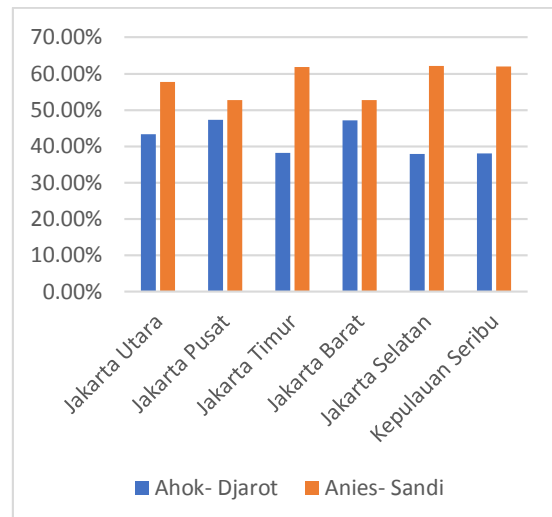
Keyword: grant, aid, islamic populism, mosque, musholla

1. PENDAHULUAN

Kajian ini akan membahas mengenai fenomena populisme yang terjadi di DKI Jakarta dengan fokus secara khusus membahas Gubernur Anies Baswedan pasca terpilih sebagai kepala daerah tahun 2017. Pemilihan kepala daerah tersebut sangat erat dengan politik identitas yang secara khusus menggunakan sarana agama Islam demi meraih suara. Salah satu fenomena besar terjadi pada saat demo besar menuntut kepala daerah saat itu yakni Basuk Tjahaja Purnama untuk diadili buntut dari kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di Kepulauan Seribu (Prayogi : 2019). Melalui pihak tertentu seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-MUI) aksi terjadi secara besar-besaran. Organisasi Masyarakat tersebut juga banyak yang merupakan pendukung Anies-Sandi dalam pemilihan kepala daerah.

Dibuktikan dengan pernyataan ketua GNPF-MUI yakni Bachtiar Nasir yang secara terbuka mendeklarasikan dukungan serta menyatakan bahwa kemenangan Anies- Sandi merupakan daerah tersebut faktanya cukup berpengaruh melihat dari populasi yang berada diangka 9,4 Juta penduduk per tahun 2021 (BPS: 2021). Potensi sebagai pemilih mayoritas tersebut dimanfaatkan oleh Anies-Sandi untuk menjadi kunci kemenangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017.

Strategi yang dibangun ternyata sukses mengantarkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 meskipun pada putaran pertama hanya mendapat 39,97 persen suara dibandingkan Ahok-Djarot yakni 49,96% suara (KPU: 2017). Namun ternyata pada putaran kedua Anies-Sandi berhasil membalik keadaan dengan mendapatkan suara mayoritas pada saat itu.



Gambar 1: Rekapitulasi Suara Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua

Sumber KPU Provinsi DKI Jakarta

Strategi yang menysasar kalangan umat Islam seringkali terlihat dalam kampanye yang dilakukan oleh Anies-Sandi. Ini bisa terlihat bagaimana pada saat itu akun media sosial kampanye Anies- Sandi beberapa kali memuat narasi Islam dalam unggahannya. Secara implisit itu dilakukan Anies Baswedan dengan menggunakan peci sebagai sebuah sarana komunikasi yang menyatakan diri mereka secara tidak langsung merupakan calon pemimpin muslim. Selain itu adanya penyebutan dalam kata “seiman”, “berpeci”, “Islami” juga nampak dari berbagai media sosial kampanye Anies-Sandi. Bahkan kalimat populisme Islam tersebut terdapat dalam sebuah akun kampanye yang menyatakan “Dekat sama Allah, seiman...” menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama digunakan (Triantoro: 2019). Pada sebuah video Anies juga menyatakan bahwa dirinya “Islami” yang berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada umat Islam. Anies juga menggunakan kata “berpeci” dalam akun media sosial *Instagram* pada dialog yang diunggahnya.

Strategi politik yang sering menysasar rumah ibadah menjadi salah satu metode yang digunakan oleh Anies Baswedan (Widya: 2019). Apabila kita

lihat media sosial dan pemberitaan sering kali terdengar kabar bahwa Anies berkampanye di Masjid atau Musholla. Secara tidak langsung hal tersebut mendukung gagasan yang menyatakan bahwa Anies merupakan pemimpin umat muslim. Secara eksplisit memang Anies tidak pernah menyatakan secara terbuka mengenai hal tersebut. Kendati demikian kajian ini akan mendeskripsikan mengenai jalan politik Anies melalui kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang akan dijadikan objek kajian yakni Hibah Bantuan Operasional Rumah Ibadah khusus kepada Masjid serta Musholla. Kebijakan yang bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta tersebut akan mengisyaratkan bahwa ada pesan keberpihakan kepada umat Muslim di DKI Jakarta.

Penjelasan sebelumnya menyinggung mengenai Populisme Islam. Konsep tersebut berasal dari kata Populisme, konsep tersebut menurut Allan Knight (1998) merupakan sebuah bentuk gaya politik yang secara khusus memperlihatkan adanya kedekatan hubungan antara seorang pemimpin dan masyarakat. Roberts (2011) juga menyatakan bahwa populisme merupakan sebuah gerakan yang mengandalkan sebuah pemimpin personalistik sehingga dapat memobilisasi massa dari kalangan atas hingga bawah dalam usaha untuk menentang kelompok elit berkuasa dengan mengatasnamakan penderitaan rakyat (Rahmawati, 2018). Secara umum populisme merupakan sebuah cara berdemokrasi dengan menggunakan retorika identitas tertentu. Melalui penjelasan tersebut populisme Islam dapat dikategorikan objek masyarakat yang secara umum digantikan dengan kelompok masyarakat Islam. Kasus populisme Islam inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam strategi Anies Baswedan. Adanya dukungan dari kelompok Islam seperti GNPF-MUI, Front Pembela Islam, dan PWNU DKI Jakarta merupakan upaya mobilisasi

kelompok masyarakat Islam dengan menghadirkan seorang figur pemimpin personalistik seperti Anies Baswedan.

Populisme sendiri bukan merupakan fenomena baru yang terjadi dan bukan pertama kali digunakan pada kontestasi politik. Kita bisa melihat bagaimana citra populis yang dibangun oleh Partai PDI-P yang menyatakan diri sebagai “Partai Wong Cilik” (Kaligis: 2014). Slogan partai tersebut merupakan salah satu eksistensi populisme yang coba dibangun oleh partai politik dalam meraih suara kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah. Populisme Islam yang coba dibangun Anies sudah terjadi sejak pemilihan kepala daerah tahun 2017. Pasangan Anies- Sandi yang pada saat itu didukung secara langsung oleh Imam Besar Front Pembela Islam yakni Habib Rizieq Syihab dan Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta KH. Mahfudz Asirun. Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta bahkan secara terbuka menyerukan untuk wajib memilih dan menyebarkan memilih Gubernur Muslim (Zaki: 2017).

Penyaluran bantuan dari pemerintah provinsi ke Masjid dan Musholla kepada DMI Provinsi DKI Jakarta juga menjadi salah satu upaya implisit. Karena pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental Spiritual bisa secara langsung melakukan sosialisasi sekaligus penyaluran. Namun dalam praktiknya, penyaluran dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa adanya lembaga masjid yang lebih terstruktur dan memiliki data lebih lengkap mengenai rumah ibadah. Dewan Masjid Indonesia sendiri merupakan sebuah organisasi masyarakat bentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 113 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No. 1577 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Wilayah

Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2020. Melalui pendekatan Populisme Islam yang akan dibahas kebijakan bantuan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mempengaruhi pilihan politik khususnya kepada para penerima. Populisme Islam dalam kajian ini berusaha menjelaskan bahwa pendekatan tersebut ingin menggaet pemilih dari kelompok masyarakat Islam di DKI Jakarta khususnya para pengurus rumah ibadah yang dapat memberikan pengaruh kepada para jamaah. Kebijakan ini diambil melihat dari sisi anggaran hibah yang dikeluarkan tidak sedikit. Anggaran yang mencapai 140 miliar pada tahun 2021 dinilai sebagai salah satu bentuk realisasi dari pendekatan populis.

Persebaran penerima hibah cukup unik untuk analisa dikarenakan terdapat perbedaan antara data bangunan yang berbeda antara BPS dengan data milik DMI DKI Jakarta karena berjumlah total 6300 Masjid dan Musholla penerima bantuan. Penerima bantuan tersebut mencakup seluruh wilayah kota dan kabupaten yang ada di DKI Jakarta. Anggaran bantuan untuk masjid berjumlah Rp24.000.000/tahun dan musholla Rp12.000.000/tahun (DMI: 2023). Menariknya jumlah penerima bantuan berada diangka yang mencapai 6300 masjid dan musholla, artinya lebih dari 90,54% dari seluruh total sarana ibadah umat muslim tersebut yakni 6958 bangunan (BPS: 2021).

Sumber: DMI Provinsi DKI Jakarta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan berbentuk hibah kepada mesjid dan musholla di DKI Jakarta merupakan realisasi dari 23 Janji Kampanye Anies-Sandi pada Pilkada 2017. Janji tersebut salah satunya pada poin 21 yang isinya "Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan majelis taklim berbasis asas proporsionalitas dan

Tabel 1 :Data Jumlah Penerima Bantuan Hibah BOTI Masjid dan Musholla Tahun 2022

No	Nama Kota/Kabupaten Administratif	Jumlah Penerima
1	Kota Jakarta Utara	1035
2	Kota Jakarta Timur	1745
3	Kota Jakarta Barat	1369
4	Kota Jakarta Pusat	769
5	Kota Jakarta Selatan	1336
6	Kabupaten Kepulauan Seribu	46
		6300

2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada narasumber. Teknik *sampling* akan menggunakan *Purposive Sampling* secara khusus kepada Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sebagai penerima bantuan Hibah Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian karena para anggota DKM Masjid dan Musholla tersebut sangat banyak dan tersebut (Lenaini: 2021). Hasil penelitian diharapkan akan lebih menjelaskan mengenai fenomena bantuan yang cukup besar tersebut. Teknik tersebut dipilih karena anggota dewan kemakmuran masjid yang cukup banyak dan tersebar di setiap wilayah Jakarta. Peneliti akan membagi narasumber tersebut menjadi 2 yakni Informan Utama dan Informan. Untuk Informan Utama yakni Dewan Masjid Indonesia dan Biro Dikmental Sekda Provinsi DKI Jakarta. Informan yakni pengurus masjid penerima bantuan hibah.

keadilan". Mengutip wawancara dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, realisasi tersebut sudah direncanakan pada tahun 2018. Pada saat itu pemerintah provinsi mengumpulkan semua perwakilan lembaga rumah ibadah salah satunya Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Semua lembaga dari berbagai agama sudah dikumpulkan dan disepakati bahwa dari agama Islam yang menjadi fasilitator adalah DMI Provinsi

DKI Jakarta. Alasan pemilihan tersebut menurut Biro Pendidikan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta, karena DMI DKI Jakarta merupakan lembaga keagamaan yang merupakan bentukan resmi Pemprov. Klaim dari DMI Prov. DKI Jakarta

Dewan Masjid DKI Jakarta dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada para penerima. Biro Dikmental mengatakan bahwa DMI bertugas sebagai fasilitator bantuan sama seperti lembaga-lembaga lain. Untuk itu DMI DKI Jakarta memiliki peranan penting untuk menyeleksi tiap Masjid dan Musholla untuk menjadi penerima bantuan. Salah satu syarat penting untuk menerima bantuan yakni dengan adanya Surat PM-1 dari kelurahan sebagai tanda bukti bahwa bangunan benar berdiri di daerah tersebut. Surat PM-1 merupakan singkatan dari Sebagai sebuah organisasi masyarakat keberadaan DMI DKI Jakarta cukup unik karena menjadi satu-satunya organisasi masyarakat berbasis agama yang memiliki legalitas dari pemerintah provinsi khususnya Pemprov DKI Jakarta. Landasan tersebut berawal pada era Gubernur Sutiyoso melalui Keputusan Gubernur No. 43 1999 lalu diubah pada 2016 menjadi Peraturan Gubernur No.113 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Melalui peraturan tersebut diatur Satuan Organisasi Tata Kerja bagi Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta. Selain peraturan. mengenai SOTK, DMI

Besaran anggaran dan jumlah penerima bantuan hibah tersebut mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya khususnya pada musholla yakni pada tahun 2020 yang naik 100 persen dan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 50 persen berdasarkan SK DMI tahun 20. Semenjak dimulai tahun 2019 sampai tahun 2022 tercatat sudah banyak masjid dan musholla yang menjadi anggota Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta sehingga layak menjadi penerima bantuan. Perlu

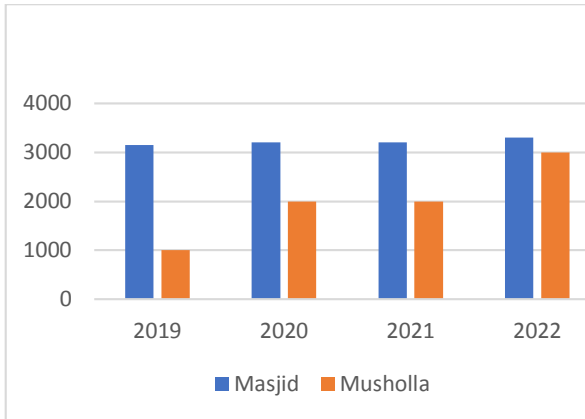
menyatakan bahwa anggaran untuk bantuan operasional tempat ibadah sudah turun sejak 2018 namun karena adanya kendala administrasi baru tahun 2019 bantuan tersebut diterima oleh Masjid dan Musholla.

Surat Pengantar Model Satu, umumnya digunakan untuk berbagai keperluan oleh si pembuat yang akan ditandatangani oleh pejabat keluarah seperti Lurah dan atau Sekretaris Lurah. Pada syarat ini PM-1 bertujuan sebagai pengantar domisili yang menyatakan bahwa masjid atau musholla tersebut berada pada wilayah administratif pembuat surat. Selanjutnya DMI DKI Jakarta akan membuat surat ketetapan yang berisi daftar Masjid dan Musholla yang menjadi anggota. Data anggota tersebut yang menjadi bukti pelaporan bahwa benar penyaluran bantuan kepada benar diterima.

DKI Jakarta dalam hal kepengurusan memiliki legalitas resmi dari Pemprov yakni melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1577 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2020. Sementara untuk kepengurusan DMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2025 berdasarkan Surat Keputusan PP DMI No.5 Tahun 2021 Tentang Susunan Pengurus dan Personalia Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2020 – 2025.

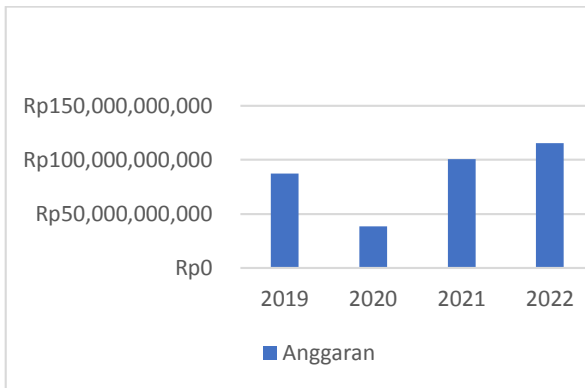
digarisbawahi bahwa para penerima bantuan yang terdapat pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh DMI Provinsi DKI Jakarta merupakan penerima pasti bantuan hibah. Oleh karena itu mekanisme pemberian bantuan harus melalui tahapan verifikasi yang dilakukan secara internal oleh DMI DKI Jakarta dengan persyaratan dari Pemprov DKI Jakarta. Verifikasi tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh publik sehingga menimbulkan sebuah indikasi baru yakni adanya masjid dan musholla tertentu yang

sengaja untuk diprioritaskan dalam upaya penerimaan bantuan meskipun dari pihak



Gambar 2. Jumlah Masjid dan Musholla Anggota DMI

Sumber: SK DMI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022



Gambar 3. Anggaran BOTI Masjid dan Musholla Tahun 2019-2022

Sumber: DMI Provinsi DKI Jakarta

Proses penerimaan bantuan hibah seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adalah melalui verifikasi yang dilakukan oleh internal DMI Provinsi DKI Jakarta. Namun dari data yang diterima terdapat banyak data ganda terhadap penerima bantuan pada tahun 2019. Meskipun pihak DMI DKI Jakarta mengatakan bahwa dalam data tersebut sudah diperbaiki dan penerima yang mendapatkan hibah sebanyak dua kali sudah mengembalikan dana. Kenyataannya tidak dijelaskan masjid dan musholla mana yang sudah mengembalikan secara utuh pengembalian dana. Selain itu tidak adanya evaluasi pada tahun 2020 dan

DMI DKI Jakarta menyangkal hal tersebut.

pihak DMI Provinsi DKI Jakarta sehingga tetap menjadi fasilitator bantuan perlu dipertanyakan. Jangka waktu satu tahun yakni 2020 seharusnya bisa digunakan untuk melakukan verifikasi ulang mengenai anggota DMI Provinsi DKI Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Mengingat tahun 2020 DMI DKI Jakarta kembali menjadi fasilitator bantuan patut dipertanyakan apakah ada hubungan khusus antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dewan Masjid Indonesia sehingga tidak ada sanksi dari maladministrasi verifikasi penerima bantuan.

Pada kasus lain DMI DKI Jakarta menjadi penerima bantuan pertama terkait program hibah bantuan operasional tempat ibadah yakni tahun 2019. Didahulukannya DMI Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga dari agama lain membuat kecenderungan adanya keistimewaan kepada DMI Provinsi DKI Jakarta dan Masjid/Musholla. Kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan kesepakatan mengenai lembaga yang diundang untuk pertemuan membahas hibah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2018. Fakta dilapangan ternyata lembaga keagamaan non Islam menerima bantuan yang dimulai tahun 2020. Tahun tersebut juga terjadi pemotongan bantuan kepada seluruh tempat ibadah sebesar 50 persen terkait pandemi Covid-19. Persepsi ini terkait hubungan khusus antara Anies Baswedan dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla. Karena yang menawarkan Anies untuk menjadi calon gubernur pada tahun 2017 merupakan Jusuf Kalla sebagai aktor utama (Rofiqi: 2020).

Para penerima bantuan juga merupakan para pendukung Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Mereka secara khusus mendukung program Anies Baswedan yakni mendukung umat Islam. Pandangan

terhadap identitas pemimpin muslim saat itu yang diwakili oleh figur Anies Baswedan sebagai calon gubernur merupakan bentuk perlawanan dan juga kampanye untuk mengungguli Basuki Tjahaja Purnama. Populisme yang coba untuk dibangun dengan menyebarkan pandangan politik bahwa Anies membela hak-hak umat Islam salah satunya dengan memberikan dukungan kepada rumah ibadah umat Islam yakni Masjid dan Musholla meskipun secara tersirat. Bentuk bantuan yang lebih banyak dan juga pengawasan yang kurang menjadi indikator adanya upaya mempertahankan hubungan non partisan antara Anies dengan para pengurus masjid dan musholla.

Hubungan sosial yang coba dipertahankan oleh Anies ini terbukti dengan dilanjutkannya program hibah tersebut pasca Sandiaga Uno mundur menjadi wakil gubernur. Keterkaitan mengenai kantong suara politik dalam pengurus masjid dan musholla dinilai cukup krusial dalam mendukung ide Anies yang mempresentasikan figure Pemimpin Muslim sebagai bentuk populisme Islam. Analisa dalam kasus mencontohkan Anies mempertahankan para pendukungnya di masjid dan musholla melalui bantuan sosial yang difasilitasi oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Para penerima bantuan menilai bantuan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian Anies terhadap umat Islam. Kondisi tersebut memperkuat hubungan sosial yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan para pendukungnya yang ada di Masjid dan Musholla karena merupakan salah satu basis dukungan non partisan.

Persyaratan yang mudah untuk mendapatkan bantuan juga memiliki kecenderungan lain. Salah satu persyaratan penting tercantung pada Pendoman Bantuan BOTI tahun 2021 memaparkan bahwa syarat pertama yakni memiliki surat PM-1. Surat tersebut merupakan sebuah keterangan bagi

seorang individu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Kasus BOTI surat tersebut menerangkan bahwa suatu rumah ibadah dalam hak ini masjid dan musholla benar berdomisili dilingkungan tempat ibadah tersebut. Terdapat adanya potensi bangunan illegal yang menerima bantuan. Hal ini karena ditiadakannya persyaratan seperti sertifikat wakaf maupun izin mendirikan bangunan. Potensi ini menguat setelah terdapat temuan bahwa ada bangunan yang sudah berdiri namun tidak memiliki kedua legalitas tersebut. Ini cukup krusial mengingat bahwa dengan tidak adanya persyaratan formal bagi sebuah bangunan, maka ada potensi bagi bangunan tersebut untuk menjadi sengketa bagi pihak lain. Tindakan tersebut terdapat pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 385 dengan menyatakan bahwa penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana maksimal empat tahun.

Pengurus masjid dan musholla mempunyai peran penting dalam penyebaran atau kampanye Anies Baswedan. Hal ini karena mereka memiliki kekuatan untuk menyebarkan ide Anies melalui tempat peribadatan umat muslim tanpa melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum. Melalui peraturan tersebut terdapat celah yang mengatur hanya sebatas pelaksana, peserta, dan tim kampanye dalam pelanggaran kampanye tempat ibadah. Itu tertuang pada Pasal 280 huruf H UU Pemilu yang berbunyi *“Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,”*. Kesempatan ini diperoleh dengan melakukan penyebaran informasi kepada jamaah masjid seperti dalam ceramah, khutbah, dan pendekatan lain. Celah tersebut tidak menyebutkan pendukung tidak langsung untuk dilarang menyebarkan ide maupun figure Anies. Para pengurus masjid, marbot, dan guru ngaji dalam sebuah masjid dan musholla mayoritas bukan merupakan tim

kampanye sehingga tidak dapat dijerat pada UU Pemilu.

Para pengurus masjid dan musholla dalam melakukan hal tersebut melalui pengajian maupun pada saat khutbah. Sarana kampanye tersebut seringkali tidak mendapatkan dokumentasi sehingga sulit untuk mendeteksi kecurangan. Akibatnya sarana tersebut tidak dapat dilaporkan dan juga menjadi metode lain untuk menyebarkan ide figure populisme Islam Anies dengan perangkat keagamaan. Pada tahapan yang lebih radikal mereka dapat mengundang secara khusus tokoh tertentu untuk melakukan penyebaran informasi melalui media dakwah masing-masing. Kasus lain menyebutkan bahwa beberapa oknum pengurus masjid oknum politik dan menjalankan kegiatan politik tertentu pada suatu masjid yang dituju (Lubis: 2018). Para penerima bantuan BOTI juga merupakan pendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2019 menegaskan adanya upaya mempertahankan populisme yang sudah dibangun sejak 2017. Alasan sama seperti pemimpin agamis dan Islami merupakan corak utama para penerima bantuan dalam mendukung Anies Baswedan.

4. KESIMPULAN

Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan jalan politik Anies Baswedan khususnya sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Politik saat itu yang sarat akan politik identitas dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk keuntungan pribadi. Sementara itu banyak studi literatur yang sudah menjelaskan mengenai populisme Islam yang coba untuk dibawa oleh Anies melalui pelbagai strategi salah satunya dengan membuat Bantuan Operasional Tempat Ibadah.

Populisme Islam ini dilakukan baik secara daring maupun langsung kepada pemilih. Pemilihan kata agamis dan berpeci dalam media sosial Anies menjelaskan ada pesan yang ingin dibawa yakni sebagai seorang pemimpin umat

muslim di DKI Jakarta. Ini tentu disambut baik oleh para pengurus rumah ibadah seperti Masjid dan Mushola. Melalui pendekatan emosional dan agama secara tersirat adanya upaya untuk menjaring suara umat Islam melalui sarana rumah ibadah. Hal ini dikarenakan kemampuan para pengurus untuk memberikan pengaruh kepada para jamaah. Metode yang dilakukan yakni menyebarkan Informasi Anies sebagai pemimpin muslim yang adil dan amanah pada momen peribadatan seperti khutbah dan ceramah.

Berkenaan dengan adanya potensi politik secara tidak langsung dengan memanfaatkan para pengurus masjid dan mushola tersebut secara tersirat BOTI merupakan salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan loyalitas para pendukungnya tersebut. Meskipun terdapat rumah ibadah dari agama non Islam juga mendapatkan bantuan yang sama namun dengan jumlah dan kuantitas berbeda signifikan untuk memberikan pesan secara tersirat bahwa bantuan tersebut untuk semua pihak dan tidak terbatas.

Namun adanya temuan seperti para penerima bantuan yang merupakan pendukung dan ikut berkampanye secara tidak langsung dapat membantah hal tersebut. Ditambah kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi baik secara administratif maupun pidana dalam terjadinya data ganda penerima bantuan tahun 2019 menguatkan tesis tersebut. Persyaratan yang cenderung memudahkan dan tanpa melihat aspek pidana dengan tidak dimasukkannya persyaratan seperti sertifikat wakaf dan/atau izin mendirikan bangunan memperbesar potensi adanya bangunan rumah ibadah yang menempati tanah sengketa dan melanggar KUHP. Pada akhirnya adanya relasi kuasa antara Anies Baswedan dan para penerima bantuan untuk melanggengkan ide populisme Islam dengan kecenderungan dampak sosial politik pada mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, P., & Wahyudi, M. H. (2017). Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).
- Effendi, M. R., & Syafrudin, I. (2020). Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 12-27.
- Fiady, N. (2022). *Praktik Patronase dan Klientelisme dalam Distribusi Program Pemerintah (Studi Kasus: Calon Legislatif Petahana Partai Gerindra DPRD Provinsi DIY pada Pemilihan Legislatif 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kaligis, R. (2014). Nasionalisme dan kelas sosial: Ideologi dan praktik partai nasionalis di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 27(2), 77-90.
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 10.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12-16.
- Lubis, R. A. F. (2018). *Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan Bkm Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181-206.
- Pratama, R. A. (2017). Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33-45.
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31-43.
- Rahmawati, R. (2018). Populisme di Aras Demokrasi Indonesia. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(1).
- Rofiqi, R. (2020). Rekrutmen Politik dalam Proses Penentuan Keputusan Pencalonan Anis Baswedan–Sandiaga Uno di Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017. *Global and Policy Journal of International Relations*, 7(01).
- Saragintan, A., & Hidayat, S. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik*, 2(1), 5.
- Sawri, S. (2020). Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022: Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 14-27.
- Triantoro, D. A. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 19-40.
- Widya, A. P. (2019). *Strategi Pemenangan Pasangan Calon Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Zaki, M. A. (2017). *Pemimpin non muslim dalam pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (studi kasus Gubernur Non-Muslim di DKI Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).